

Analisis Dampak Kredit Konsumtif Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Nasabah PNS Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)

Regilinda Kolo¹, Maria I. Hewe Tiwu², Muhammad A. Habibi Mushlih³ Cicilia A. Tungga⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang
rhelykolo@mail.com

Published: September , 2026

ABSTRACT

Consumptive credit is a strategic financial instrument that enables households to meet needs requiring large funds without waiting for full savings accumulation. This study analyzes the impact of consumptive credit on household consumption patterns among Civil Servant (PNS) customers of Bank NTT Main Branch Office Kupang. This study employed a qualitative approach with a descriptive case study design, involving 11 informants selected through purposive sampling, consisting of 10 key informants (PNS customers using consumptive credit) and 1 supporting informant (Credit Supervisor). Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model assisted by NVivo 12 software with a word frequency query feature, and validated through source, technique, and time triangulation. The results show that consumptive credit is utilized for housing, education, health, land investment, and productive business development, driven by simple procedures and an automatic salary deduction system. Before receiving credit, household consumption was income-based, prioritizing basic needs and deferring large purchases. After receiving credit, households gained greater financial flexibility but also faced increased routine expenditures from monthly installments and asset ownership costs. The impact is dualistic: consumptive credit accelerates need fulfillment and improves quality of life, yet simultaneously reduces disposable income, weakens saving capacity, and increases household financial vulnerability.

Keywords: *Consumptive Credit, Household Consumption Pattern, Civil Servants, Bank NTT, Consumption Smoothing*

ABSTRAK

Kredit konsumtif merupakan instrumen keuangan strategis yang memungkinkan rumah tangga memenuhi kebutuhan berbiaya besar tanpa harus menunggu akumulasi tabungan penuh. Penelitian ini menganalisis dampak kredit konsumtif terhadap pola konsumsi rumah tangga pada nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif, melibatkan 11 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas 10 informan kunci (nasabah PNS pengguna kredit konsumtif) dan 1 informan pendukung (Supervisi Kredit). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 melalui fitur word frequency query, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit konsumtif dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan, investasi tanah, dan pengembangan usaha produktif, yang didorong oleh kemudahan prosedur dan sistem potong gaji otomatis. Sebelum menerima kredit, pola konsumsi rumah tangga bersifat income-based dengan prioritas pada kebutuhan pokok dan penundaan pembelian bernilai besar. Setelah menerima kredit, rumah tangga memperoleh fleksibilitas keuangan yang lebih besar, namun juga menghadapi peningkatan pengeluaran rutin akibat kewajiban angsuran dan biaya kepemilikan aset. Dampaknya bersifat dualistik: kredit konsumtif mempercepat pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi sekaligus menurunkan pendapatan disposabel, melemahkan kapasitas menabung, dan meningkatkan kerentanan finansial rumah tangga.

Kata Kunci: Kredit Konsumtif, Pola Konsumsi Rumah Tangga, Pegawai Negeri Sipil, Bank NTT, Consumption Smoothing

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam memengaruhi perekonomian, baik secara mikro maupun makro, dengan fungsi utama sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit (Firmansyah, 2014). Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peranan penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia serta dalam penyaluran dan pengelolaan dana masyarakat (Wahyu dkk., 2024). Salah satu produk perbankan yang berperan dalam penyaluran dana tersebut adalah kredit konsumtif.

Kredit konsumtif merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian modern karena memungkinkan individu mengakses barang dan jasa secara langsung tanpa harus menunggu akumulasi tabungan penuh. Kredit konsumtif mencakup pinjaman untuk keperluan pribadi seperti pembelian kendaraan, elektronik, renovasi rumah, pendidikan, dan gaya hidup, yang sering kali didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan kredit konsumtif tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, serta keinginan memenuhi kebutuhan yang tidak selalu dapat dibiayai dari pendapatan saat ini (Mankiw, 2021). Inovasi produk dan layanan perbankan, termasuk penyederhanaan prosedur kredit, pemanfaatan teknologi digital, serta penawaran suku bunga yang lebih kompetitif, membuat kredit konsumtif semakin mudah diakses, sehingga mendorong rumah tangga memanfaatkan kredit sebagai alternatif sumber pembiayaan, terutama dalam menghadapi keterbatasan pendapatan dan kebutuhan yang bersifat mendesak atau bernilai besar (Caksana & Wulandari, 2021).

Bank NTT merupakan lembaga keuangan milik daerah yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah dan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi melalui penyaluran kredit konsumtif dalam jangka waktu yang relatif cepat. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTT secara khusus menargetkan kelompok spesifik seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan produk kredit yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Bank NTT mendominasi pasar kredit konsumtif di wilayah Kota Kupang, terutama di kalangan pegawai negeri yang memiliki pendapatan stabil namun rentan terhadap perubahan pola konsumsi akibat kemudahan pinjaman untuk kebutuhan non-esensial dan gaya hidup (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai kredit konsumtif di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai kredit konsumtif tercatat sebesar Rp21.069.741,07 juta, yang terdampak oleh awal pandemi Covid-19 sehingga permintaan kredit menurun akibat ketidakpastian ekonomi. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi Rp22.526.614,91 juta atau naik sekitar 6,9% yang didorong oleh stimulus pemerintah dan pemulihan awal pascapembatasan ekonomi. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai Rp24.046.903,20 juta atau naik sekitar 6,8%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp21.518.099,68 juta atau turun sekitar 10,5%, yang disebabkan oleh inflasi dan kenaikan suku bunga yang mengurangi daya beli masyarakat terhadap kredit. Pemulihan yang kuat terjadi pada tahun 2024 dengan nilai melonjak sekitar 31,8% dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif, total kredit konsumtif selama lima tahun tersebut mencapai sekitar Rp117.497.915,21 juta dengan rata-rata tahunan sebesar Rp23.499.583,04 juta. Data ini mengindikasikan bahwa kredit konsumtif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah masalah utang berlebih (BPS NTT, 2026).

Pegawai Negeri Sipil merupakan kelompok dengan kestabilan ekonomi yang relatif lebih baik di tengah keterbatasan lapangan kerja, dengan karakteristik tingkat pendapatan yang stabil sehingga menjadikan mereka debitur dengan tingkat keamanan tinggi bagi lembaga keuangan, terutama melalui sistem pemotongan gaji secara langsung. Meskipun kredit konsumtif bertujuan memfasilitasi konsumsi, penggunaannya sering kali menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti peningkatan utang rumah tangga yang tidak seimbang dengan pendapatan tetap, sehingga dapat mengubah pola konsumsi dari kebutuhan esensial menjadi keinginan memenuhi gaya hidup mewah (Caksana & Wulandari, 2021). Hafizhah (2016) menyatakan bahwa individu dengan sifat materialisme cenderung melakukan kegiatan konsumsi irasional, memiliki kecenderungan membeli barang bermerek terkenal, serta mengutamakan gengsi sehingga kondisi keuangan pribadi menjadi tidak tertata. Pembelian barang yang berlebihan juga sering membuat individu kehilangan kontrol atas pembelian tersebut sehingga menjadikannya pembeli kompulsif (Mueller dkk., 2011).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan yang relevan. Aris dan Syechalad (2016) menganalisis bagaimana pola konsumsi dan faktor ekonomi lainnya memengaruhi permintaan kredit konsumtif di Kota Banda Aceh, dan menemukan bahwa pengeluaran pangan dan non-pangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan kredit. Penelitian tersebut melihat konsumsi sebagai alasan orang berutang, sementara penelitian ini melihat apakah dengan adanya fasilitas kredit konsumtif pola konsumsi rumah tangga PNS menjadi lebih tinggi. Wahyu dkk. (2024) menemukan bahwa banyak PNS mengambil kredit konsumtif karena tertarik dengan promo penurunan potongan bunga kredit, namun penelitian tersebut tidak melakukan analisis mendalam terhadap perubahan struktur pengeluaran rumah tangga nasabah. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa nasabah PNS di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, sebagai kelompok dengan pendapatan stabil namun terbatas, rentan terhadap jebakan utang konsumtif yang dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga, seperti pengalihan anggaran untuk cicilan kredit yang mengurangi kemampuan menabung. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kredit konsumtif terhadap pola konsumsi rumah tangga pada nasabah Pegawai Negeri Sipil di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dengan mengkaji pemanfaatan kredit konsumtif, pola konsumsi sebelum dan sesudah menerima kredit, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang berfokus pada pemahaman mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai dampak kredit konsumtif terhadap pola konsumsi rumah tangga pada nasabah PNS Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada *postpositivism* dan digunakan untuk meneliti kondisi objek di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang berlokasi di Jalan Cak Doko Nomor 50, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih karena Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sehingga relevan untuk mengkaji dampak kredit konsumtif terhadap pola konsumsi rumah tangga.

Fokus penelitian ini mencakup penggunaan kredit konsumtif, pola konsumsi sebelum dan sesudah memperoleh kredit, perubahan perilaku konsumsi akibat adanya kewajiban cicilan, serta dampak positif maupun negatif terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif berupa informasi deskriptif, pendapat, pengalaman, dan persepsi informan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data kuantitatif berupa data kredit konsumtif yang dapat diukur dan dihitung secara langsung dalam bentuk angka atau statistik (Kuncoro, 2021). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan nasabah pengguna kredit konsumtif (Nazir, 2019), serta data sekunder berupa data kredit konsumtif yang diperoleh dari Bank NTT dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi nyata terkait perilaku pola konsumsi rumah tangga nasabah PNS. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban secara langsung dari informan guna memperoleh informasi terkait penggunaan kredit dan pola konsumsi rumah tangga (Sugiyono, 2018). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan catatan peristiwa berupa data kredit nasabah, arsip atau laporan bank, serta dokumen pendukung lainnya seperti artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi media tentang kredit konsumtif.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu, dengan pertimbangan bahwa informan dianggap paling mengetahui topik permasalahan penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) nasabah PNS Bank NTT yang menggunakan kredit konsumtif, dengan mempertimbangkan golongan atau jabatan yang mencerminkan

posisi dan tingkat penghasilan; dan (2) pihak bank pada bagian kredit sebagai informan pendukung. Rincian informan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Status	Alasan
Supervisi Kredit	1 orang	Informan pendukung	Sebagai pihak yang menilai kelayakan risiko sebelum kredit disetujui
Nasabah PNS	10 orang	Informan utama	Sebagai pihak yang mengambil kredit konsumtif

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui model alir Miles dan Huberman, yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*) (Sugiyono, 2020). Peneliti menggunakan alat bantu perangkat lunak NVivo 12 yang dapat digunakan untuk mengelola data, melakukan kajian pustaka secara cepat dan efisien, melakukan triangulasi, serta membuat visualisasi hasil penelitian dari berbagai sumber yang berbeda seperti teks transkrip wawancara, catatan hasil observasi, atau dokumen tertulis (Priyanti dkk., 2020). Secara khusus, fitur *word frequency query* digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul dalam transkrip wawancara sehingga memberikan gambaran mengenai tema-tema yang paling dominan dibahas oleh para informan.

Keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi, yaitu pemeriksaan dan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara yang beragam dan waktu yang berbeda (Margono, 2010; Satori & Komariah, 2011). Triangulasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis: triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap informan sebagai bentuk *cross check* untuk menggali kebenaran informasi; triangulasi teknik, yaitu menyilangkan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber yang sama; serta triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan melalui wawancara atau observasi dalam waktu maupun situasi yang berbeda hingga ditemukan kepastian data (Sugiyono, 2013).

HASIL

Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri atas 10 informan kunci yaitu nasabah PNS Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang menerima kredit konsumtif, dan 1 informan pendukung yaitu pihak bank yang terlibat dalam proses penyaluran kredit pada posisi Supervisi Kredit. Seluruh informan kunci merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Loka Labkesmas Kupang dan sedang atau pernah menggunakan fasilitas kredit konsumtif di Bank NTT. Rincian data informan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Data Informan Penelitian

No	Nama	Instansi	Status
1	Yosef Darius Kolo	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
2	Maria Asry Mapada	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
3	Gregorius Muda	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
4	Benyamin Jeman	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
5	Melkianus Niat Jitu	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
6	Jerianto Lebadara	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
7	Ibu Soffy	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
8	Firmino Tapo	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
9	Ronaldo Eureka Sonbai	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
10	Ruben Wadu Wila	Loka Labkesmas Kupang	Informan kunci
11	Ignasius L. De Rosari	Bank NTT	Informan pendukung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Pemanfaatan Kredit Konsumtif Oleh Nasabah PNS

Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah di Nusa Tenggara Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan produk kredit konsumtif yang mudah diakses dengan prosedur yang jelas. Produk kredit konsumtif Bank NTT memiliki beberapa keunggulan, yaitu proses pengajuan yang relatif mudah, angsuran tetap sesuai kemampuan nasabah, jangka waktu kredit yang fleksibel, pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji, serta plafon kredit yang disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan membayar nasabah. Perkembangan jumlah kredit konsumtif pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Data Perkembangan Kredit Konsumtif Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kredit Konsumtif (Rupiah)
1	2020	80.700.000
2	2021	84.350.000
3	2022	98.500.000
4	2023	93.800.000
5	2024	110.850.000

Sumber: Bank NTT, 2026

Berdasarkan Tabel 3, jumlah kredit konsumtif pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang secara umum mengalami perkembangan yang meningkat meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah kredit konsumtif meningkat sebesar Rp3.650.000 dibandingkan tahun 2020, dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar Rp14.150.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan pemanfaatan fasilitas kredit konsumtif oleh nasabah PNS dalam memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi yang memerlukan dana relatif besar, seperti pembelian atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp4.700.000, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan nasabah, pertimbangan terhadap kemampuan membayar angsuran, kondisi ekonomi, maupun kebijakan penyaluran kredit. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah kredit konsumtif kembali meningkat secara signifikan sebesar Rp17.050.000 dan merupakan jumlah tertinggi selama periode tersebut, yang menunjukkan bahwa kredit konsumtif masih menjadi alternatif pembiayaan utama bagi nasabah PNS.

Selain jumlah nominal kredit, perkembangan jumlah nasabah dan debitur kredit aktif khususnya nasabah PNS selama periode 2021-2025 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Data Perkembangan Nasabah Kredit Konsumtif Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Debitur Kredit (Nasabah PNS)
2021	3.463	742
2022	3.552	785
2023	3.763	805
2024	4.050	1.025
2025	4.125	1.162

Sumber: Bank NTT, 2026

Berdasarkan Tabel 4, jumlah nasabah Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang mengalami peningkatan konsisten selama periode 2021-2025, yaitu dari 3.463 orang pada tahun 2021 menjadi 4.125 orang pada tahun 2025. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada jumlah debitur kredit PNS, yaitu dari 742 orang pada tahun 2021 menjadi 1.162 orang pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 56,6% selama lima tahun. Peningkatan jumlah debitur ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas kredit oleh nasabah PNS semakin tinggi, dan kredit konsumtif semakin banyak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga sehingga turut mengubah pola pengeluaran dan penggunaan pendapatan pada nasabah PNS.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa alasan PNS memanfaatkan fasilitas kredit konsumtif di Bank NTT beragam sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Bapak Yosef Darius Kolo dan Bapak Jerianto Lebadara mengambil kredit untuk membiayai kebutuhan pendidikan anggota keluarga yang memasuki perguruan tinggi, karena biaya awal masuk kuliah dinilai cukup besar dan tidak dapat dipenuhi hanya dari gaji bulanan. Ibu Maria Asry Mapada mengambil kredit karena kebutuhan mendadak berupa biaya rumah sakit anggota keluarga yang cukup besar dan tidak tercakup BPJS. Bapak Gregorius Muda memanfaatkan kredit untuk membeli kendaraan yang menunjang aktivitas kerja sehari-hari dan mobilitas keluarga. Bapak Benyamin Jeman menggunakan kredit untuk merenovasi rumah yang telah lama tidak diperbaiki agar lebih layak dan nyaman ditempati. Bapak Melkianus Niat Jitu dan Ibu Soffy mengambil kredit untuk membeli rumah sendiri agar tidak lagi menyewa atau tinggal bersama orang tua. Sementara itu, Bapak Firmino Tapo memanfaatkan kredit sebagai modal membangun usaha kos-kosan, Bapak Ronaldo Eureka Sonbai untuk memulai usaha ternak ayam petelur, dan Bapak Ruben Wadu Wila untuk membeli tanah sebagai investasi jangka panjang.

Informan pendukung, Bapak Ignasius L. De Rosari selaku Supervisi Kredit, menjelaskan bahwa kredit konsumtif untuk PNS paling banyak digunakan karena risikonya rendah, mengingat PNS memiliki penghasilan tetap sehingga pembayaran angsuran relatif lancar melalui pemotongan gaji langsung. Tujuan kredit umumnya diarahkan untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pihak bank tetap melakukan analisis kemampuan bayar sebelum kredit disetujui dengan memperhatikan gaji bersih setelah potongan agar angsuran tetap aman dan tidak mengganggu kebutuhan hidup nasabah.

Untuk memperkuat hasil analisis kualitatif, peneliti melakukan analisis menggunakan NVivo 12 melalui fitur *word frequency query*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kata “Kredit” (0,08%) mendominasi percakapan informan, diikuti oleh “Konsumtif” (0,07%), “Untuk” (0,06%), “Alasan” (0,05%), “Menggunakan” (0,05%), “Utama” (0,05%), “Biaya” (0,03%), “Rumah” (0,03%), “Kebutuhan” (0,02%), “Pendidikan” (0,02%), dan “Renovasi” (0,02%). Frekuensi kemunculan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan kredit konsumtif didasari oleh motivasi yang spesifik dan terencana, dengan alokasi dana paling dominan diarahkan pada investasi jangka panjang di sektor properti dan papan seperti pembelian rumah, tanah, serta renovasi rumah. Di samping itu, fasilitas finansial ini juga berfungsi sebagai bantalan darurat untuk memitigasi risiko hidup seperti biaya pendidikan dan kesehatan, sekaligus mengalami pergeseran fungsi menjadi modal usaha produktif akibat prosedurnya yang dinilai jauh lebih mudah dibandingkan kredit usaha formal.

Pola Konsumsi Rumah Tangga Sebelum Menerima Kredit Konsumtif

Pola konsumsi rumah tangga sebelum menggunakan kredit merupakan cara rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan pendapatan dan tabungan yang dimiliki, tanpa tambahan dana dari pinjaman. Pada tahap ini, keputusan konsumsi umumnya lebih terbatas oleh kemampuan finansial yang tersedia dan bersifat *income-based*, yaitu pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Konsumsi lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan keuangan yang hati-hati, dan penggunaan tabungan sebagai sumber dana untuk pembelian dalam jumlah besar. Sebagaimana disampaikan Bapak Yosef Darius Kolo, sebelum menggunakan kredit konsumtif ia hanya membeli barang sesuai pendapatan bulanan dan memilih menunda pembelian sampai dana terkumpul apabila uang belum mencukupi.

Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa pendapatan menjadi sumber utama pembiayaan konsumsi, sementara tabungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bernilai besar atau bersifat mendesak. Rumah tangga lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, menerapkan pengelolaan anggaran yang disiplin, dan menunda pembelian apabila dana belum mencukupi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum memanfaatkan kredit konsumtif, perilaku konsumsi rumah tangga masih berorientasi pada prinsip kehati-hatian dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Hasil analisis *word frequency query* pada tahap ini menunjukkan bahwa kata yang paling mendominasi adalah “Sebelum” (0,04%), diikuti “Belanja” (0,03%), “Kalau” (0,03%), “Kredit” (0,02%), “Barang” (0,02%), “Belum” (0,02%), “Cicilan” (0,02%), “Cukup” (0,02%), “Pengeluaran” (0,02%), dan “Tunda” (0,02%). Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga sebelum

menerima kredit konsumtif dicirikan oleh perilaku konsumsi yang tidak fleksibel, penuh penundaan terhadap pemenuhan barang sekunder, serta berfokus pada efisiensi anggaran akibat pendapatan yang dirasakan pas-pasan. Keterbatasan untuk melakukan konsumsi secara fleksibel inilah yang kemudian menjadi stimulus utama bagi para informan untuk mengakses fasilitas kredit konsumtif.

Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga Setelah Menerima Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif memungkinkan rumah tangga memperoleh dana tambahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan membeli barang dan jasa yang sebelumnya belum dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan pendapatan rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima kredit konsumtif terjadi perubahan pola konsumsi rumah tangga. Sebelum adanya kredit, pengeluaran rumah tangga lebih difokuskan pada kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Namun setelah memperoleh kredit, rumah tangga menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan yang lebih besar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti biaya pendidikan tinggi, pembelian rumah, pembelian kendaraan, renovasi rumah, dan biaya kesehatan. Kredit memberikan ruang finansial tambahan sehingga kebutuhan yang sebelumnya tertunda dapat segera dipenuhi, yang menunjukkan adanya peningkatan fleksibilitas dalam pola konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, penerimaan kredit juga menimbulkan kewajiban pembayaran cicilan yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Bapak Firmino Tapo menyatakan bahwa setelah usaha kos-kosan berjalan, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha harus dipenuhi bersamaan sehingga pengeluaran untuk kebutuhan pokok tetap ada sementara biaya melengkapi fasilitas kos juga cukup besar. Bapak Ronaldo Eureka Sonbai menjelaskan bahwa setelah menerima kredit, pengeluaran menjadi lebih banyak karena selain kebutuhan keluarga ia harus menyediakan biaya pakan ayam, obat-obatan, dan perawatan kandang, sehingga pendapatan harus dibagi untuk cicilan kredit, usaha, dan kebutuhan sehari-hari. Bapak Ruben Wadu Wila juga menyampaikan bahwa setelah membeli tanah melalui kredit, pengeluaran menjadi lebih besar karena selain cicilan terdapat biaya pengurusan surat-surat, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

Hasil analisis *word frequency query* pada tahap ini menunjukkan bahwa kata yang paling mendominasi adalah “Cicilan” (0,03%), diikuti “Kredit” (0,03%), “Rumah” (0,03%), “Bayar” (0,02%), “Belanja” (0,02%), “Harus” (0,02%), “Lebih” (0,02%), “Perubahan” (0,02%), “Kebutuhan” (0,02%), dan “Pengeluaran” (0,02%). Aspek kredit dan cicilan rumah merupakan kluster kata yang paling dominan muncul, yang mengindikasikan bahwa alokasi finansial terbesar sekaligus beban utama yang memicu perubahan pola konsumsi adalah kewajiban membayar hunian. Kondisi tersebut memaksa informan melakukan penyesuaian secara sadar dengan membedakan antara kebutuhan rumah tangga dan perilaku yang bersifat konsumtif. Guna mengatasi tekanan finansial, informan menerapkan strategi pemotongan anggaran serta penataan ulang keuangan, yang tercermin dari munculnya kata “mengurangi”, “diatur”, dan “potong” dalam dinamika konsumsi mereka sehari-hari.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Kredit Konsumtif Oleh Nasabah PNS

Pemanfaatan kredit konsumtif oleh PNS di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang didominasi oleh pembiayaan kebutuhan rumah, pendidikan, kesehatan, serta sebagian dialihkan sebagai modal usaha produktif. Temuan ini dapat dijelaskan melalui tiga teori konsumsi. Menurut Keynes (1939) dalam *Absolute Income Hypothesis*, tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima pada saat ini (*current income*). Seluruh informan merupakan PNS dengan pendapatan tetap setiap bulan, dan stabilitas pendapatan tersebut memberikan keyakinan untuk mengambil kredit konsumtif karena mereka memiliki kemampuan membayar angsuran secara rutin melalui mekanisme pemotongan gaji. Ketika konsumsi yang diinginkan melebihi pendapatan yang tersedia saat ini, rumah tangga akan mencari sumber pembiayaan lain, sehingga kredit konsumtif berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan rumah tangga mempertahankan tingkat konsumsi sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu akumulasi tabungan dalam jangka waktu lama.

Teori Siklus Hidup (*Life Cycle Hypothesis*) sebagaimana dijelaskan Pujaharso (2013) menyatakan bahwa individu berusaha menjaga kestabilan konsumsi sepanjang siklus kehidupannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada tahap kehidupan yang ditandai oleh tingginya kebutuhan keluarga, seperti membangun rumah, menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, serta memenuhi biaya kesehatan anggota keluarga, yang merupakan karakteristik fase produktif dalam siklus kehidupan keluarga. Penggunaan kredit untuk membeli rumah dan tanah juga mencerminkan upaya membangun aset yang akan memberikan manfaat pada masa pensiun, sehingga kepemilikan aset menjadi bagian dari strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, Teori Pendapatan Permanen (*Permanent Income Hypothesis*) yang dikemukakan Friedman (1957) menjelaskan bahwa keputusan konsumsi lebih ditentukan oleh pendapatan yang diperkirakan diterima secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Status sebagai PNS memberikan jaminan pendapatan relatif stabil hingga masa pensiun, sehingga meningkatkan kepercayaan diri informan untuk mengajukan kredit konsumtif berdasarkan ekspektasi pendapatan permanen, bukan semata kondisi kas saat pengajuan.

Dengan demikian, pemanfaatan kredit konsumtif oleh PNS di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang merupakan bentuk perilaku konsumsi yang rasional, di mana kredit digunakan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan konsumsi sepanjang siklus kehidupan, mengatasi keterbatasan pendapatan saat ini, serta memanfaatkan kepastian pendapatan di masa depan. Fungsi kredit konsumtif dalam penelitian ini tidak hanya terbatas sebagai pembiayaan konsumsi, tetapi juga berkembang menjadi sarana investasi aset, investasi sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Sasnita (2010) yang meneliti penyaluran kredit konsumtif di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, yang menemukan bahwa kredit konsumtif mendominasi portofolio pembiayaan bank dibandingkan kredit produktif dengan rasio sekitar 3:1, dengan segmen terbesar berasal dari PNS melalui produk kredit aneka guna. Kesamaan ini menunjukkan bahwa karakteristik PNS sebagai debitur dengan tingkat risiko rendah dan pendapatan stabil menjadikan kelompok ini sebagai target utama Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit konsumtif.

Pola Konsumsi Rumah Tangga Sebelum Menerima Kredit Konsumtif

Sebelum menerima kredit konsumtif dari Bank NTT, pola konsumsi rumah tangga nasabah PNS di Kota Kupang cenderung bersifat konservatif dan kurang fleksibel. Struktur pengeluaran rumah tangga didasarkan pada prinsip *income-based consumption*, yaitu seluruh aktivitas konsumsi disesuaikan secara ketat dengan besaran gaji bulanan yang diterima. Sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan primer seperti pangan, listrik, air, dan biaya pendidikan anak, sedangkan pembelian barang sekunder dan tersier dilakukan melalui penundaan konsumsi (*deferred consumption*) hingga dana yang diperlukan berhasil dikumpulkan. Temuan ini sejalan dengan Teori Konsumsi Keynes (1939), yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga ditentukan terutama oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan (*current disposable income*); ketika pendapatan relatif terbatas, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sementara kemampuan menabung menjadi rendah.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Pendapatan Permanen (Friedman, 1957). Sebelum memperoleh kredit, kemampuan konsumsi rumah tangga PNS masih dibatasi oleh pendapatan permanen yang relatif tetap, yaitu gaji bulanan sebagai aparatur sipil negara, sehingga ketiadaan sumber pendanaan tambahan menyebabkan rumah tangga memilih menunda konsumsi barang bernilai besar. Setelah memperoleh akses kredit, keterbatasan likuiditas tersebut berkurang sehingga rumah tangga dapat mengonsumsi lebih awal berdasarkan ekspektasi bahwa cicilan akan dibayar menggunakan pendapatan tetap pada masa mendatang. Dalam kerangka Teori Siklus Hidup (Pujaharso, 2013), kredit berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan rumah tangga menggeser konsumsi dari masa depan ke masa kini (*intertemporal consumption smoothing*). Ketiga teori ini saling melengkapi: Keynes menjelaskan bahwa konsumsi sebelum memperoleh kredit sangat dipengaruhi pendapatan saat ini, hipotesis pendapatan permanen menjelaskan bahwa akses kredit memungkinkan optimalisasi konsumsi berdasarkan ekspektasi pendapatan masa depan, sementara hipotesis siklus hidup menunjukkan bahwa kredit menjadi instrumen untuk meratakan konsumsi sepanjang siklus kehidupan.

Visualisasi data NVivo 12 yang menunjukkan dominasi kata “sebelum”, “belanja”, “belum”, “tunda”, dan “pas-pasan” mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan keuangan rumah tangga sebelum

memperoleh kredit ditandai oleh perilaku konsumsi yang sangat berhati-hati dan berorientasi pada pengendalian pengeluaran. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum memperoleh kredit konsumtif, perilaku konsumsi rumah tangga PNS lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs-based consumption*) daripada pemenuhan keinginan (*wants-based consumption*). Hasil ini mendukung temuan Aris dan Syechalad (2016) mengenai pengaruh pola konsumsi rumah tangga terhadap permintaan kredit konsumtif di Banda Aceh, yang menyimpulkan bahwa semakin besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, semakin kecil kemampuan rumah tangga menabung sehingga kebutuhan akan sumber pembiayaan eksternal melalui kredit menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut juga tercermin pada rumah tangga PNS di Kota Kupang, di mana keterbatasan likuiditas dan keharusan menunda berbagai kebutuhan penting menjadi faktor pendorong pemanfaatan fasilitas kredit konsumtif.

Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga Setelah Menerima Kredit Konsumtif

Pencairan kredit konsumtif membawa perubahan nyata terhadap struktur pengeluaran dan pola konsumsi rumah tangga nasabah PNS. Akses terhadap kredit meningkatkan likuiditas rumah tangga sehingga kebutuhan yang sebelumnya tertunda dapat segera direalisasikan. Perubahan tersebut terlihat pada meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebagai konsekuensi kepemilikan aset baru; setelah memiliki rumah atau kendaraan melalui pembiayaan kredit, muncul berbagai pengeluaran rutin baru seperti pembayaran listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan rumah, serta perawatan kendaraan. Dengan demikian, kepemilikan aset yang diperoleh melalui kredit tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga menciptakan komitmen pengeluaran jangka panjang yang harus dipenuhi setiap bulan. Selain itu, kredit konsumtif memungkinkan rumah tangga memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti pembelian perabot rumah tangga serta pembiayaan pendidikan tinggi anak termasuk biaya tempat tinggal, buku, dan transportasi.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari perilaku yang berorientasi pada penundaan konsumsi (*deferred consumption*) menuju konsumsi yang lebih aktif, sehingga kredit konsumtif mengubah mekanisme pemenuhan kebutuhan dari berbasis tabungan menjadi berbasis pembiayaan. Dalam kerangka Teori Konsumsi Keynes (1939), kredit konsumtif berperan sebagai tambahan daya beli (*purchasing power*) yang memperbesar kapasitas konsumsi rumah tangga meskipun pendapatan bulanan relatif tidak mengalami perubahan. Perubahan ini juga sejalan dengan Hipotesis Siklus Hidup, di mana kredit konsumtif memungkinkan rumah tangga memenuhi kebutuhan yang muncul pada tahap kehidupan tertentu tanpa harus menunggu peningkatan pendapatan atau akumulasi tabungan, sehingga berfungsi sebagai mekanisme *consumption smoothing*. Temuan ini memiliki kesamaan dengan Achmad (2019) yang meneliti pembiayaan konsumtif pada BPRS Bandar Lampung dan menyimpulkan bahwa pembiayaan konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat. Kecenderungan serupa terlihat pada nasabah PNS Bank NTT, meskipun dalam tingkat yang lebih terbatas, di mana kemudahan akses terhadap dana kredit dapat memunculkan kebutuhan baru yang sebelumnya belum menjadi prioritas.

Dampak Kredit Konsumtif Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga

Dampak positif kredit konsumtif dalam penelitian ini mencakup tiga aspek. Pertama, akselerasi pemenuhan kebutuhan hidup, di mana kredit berperan sebagai mekanisme percepatan pemenuhan kebutuhan bernilai besar seperti kepemilikan rumah layak huni, renovasi bangunan, peningkatan kualitas sanitasi, serta kepemilikan kendaraan sebagai sarana pendukung mobilitas kerja. Dalam perspektif Hipotesis Siklus Hidup, tindakan ini merupakan strategi rumah tangga untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang diinginkan pada fase kehidupan tertentu. Kedua, peningkatan kualitas hidup (*quality of life*), di mana akses terhadap kredit memberikan rasa aman karena kebutuhan penting seperti biaya awal pendidikan anak di perguruan tinggi dan kebutuhan kesehatan anggota keluarga dapat segera dipenuhi tanpa menunggu tersedianya tabungan dalam jumlah besar. Ketiga, stimulus terhadap kemandirian ekonomi, di mana beberapa informan menggunakan sebagian dana pinjaman untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan tambahan (*secondary income*) seperti usaha kos-kosan dan peternakan ayam, sehingga terjadi transformasi fungsi kredit dari sekadar instrumen konsumsi menjadi modal awal untuk

memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga dan berpotensi meningkatkan pendapatan permanen keluarga.

Di sisi lain, kredit konsumtif juga menimbulkan tiga dampak negatif. Pertama, kontraksi pendapatan disposabel jangka panjang, di mana sistem pembayaran melalui pemotongan gaji otomatis menyebabkan sebagian pendapatan bulanan telah dialokasikan terlebih dahulu untuk kewajiban kredit sebelum diterima sebagai *take-home pay*, sehingga sebagian pendapatan menjadi bersifat tetap dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Kedua, penurunan kapasitas tabungan (*saving capacity loss*), di mana alokasi pendapatan yang lebih besar untuk pembayaran utang menyebabkan ruang untuk menyisihkan dana tunai semakin terbatas, yang menunjukkan adanya penurunan *Marginal Propensity to Save* (MPS) sehingga rumah tangga memiliki kemampuan lebih rendah dalam mengantisipasi kebutuhan tidak terduga. Ketiga, peningkatan kerentanan finansial rumah tangga (*financial vulnerability*), di mana ketergantungan pada pendapatan tetap untuk memenuhi kewajiban kredit membuat rumah tangga memiliki ruang adaptasi lebih kecil ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau biaya kesehatan mendadak. Risiko tersebut semakin besar apabila keputusan mengambil kredit tidak didasarkan pada perencanaan keuangan yang matang, karena rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan rumah tangga mengalami *overleveraging*, yaitu kondisi ketika beban utang telah melebihi kemampuan pembayaran yang sehat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit konsumtif memiliki karakter ambivalen dalam kehidupan ekonomi rumah tangga PNS. Kredit mampu mempercepat pencapaian tujuan konsumsi, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan membuka peluang pendapatan tambahan. Namun, kredit juga membawa konsekuensi berupa penurunan pendapatan disposabel, melemahnya kemampuan menabung, serta meningkatnya risiko kerentanan finansial. Oleh karena itu, dampak kredit konsumtif sangat ditentukan oleh bagaimana rumah tangga mengelola dana pinjaman, memahami kemampuan pembayaran, dan menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dengan keberlanjutan kondisi keuangan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nasabah Pegawai Negeri Sipil di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang mengajukan kredit konsumtif terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi melalui gaji bulanan. Dana kredit dimanfaatkan untuk pembelian atau renovasi rumah, pendidikan, kesehatan, investasi tanah, serta pengembangan usaha produktif, dengan kemudahan prosedur dan sistem potong gaji otomatis sebagai faktor utama yang mendorong pemanfaatan kredit tersebut. Sebelum menerima kredit, pola konsumsi rumah tangga PNS cenderung bergantung pada pendapatan bulanan dengan pengeluaran yang diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan bernilai besar harus ditunda. Setelah memperoleh kredit, rumah tangga memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tertunda; namun munculnya kewajiban angsuran dan biaya tambahan atas kepemilikan aset menyebabkan peningkatan pengeluaran rutin rumah tangga.

Secara keseluruhan, kredit konsumtif memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan percepatan pemenuhan kebutuhan, tetapi juga memberikan dampak negatif berupa bertambahnya beban pengeluaran melalui kewajiban cicilan, menurunnya pendapatan disposabel, melemahnya kapasitas menabung, serta meningkatnya kerentanan finansial. Oleh karena itu, pemanfaatan kredit perlu disertai dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko finansial yang ditimbulkan.

REKOMENDASI

Bagi nasabah PNS sebagai rumah tangga pengguna kredit, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dalam mengelola dana kredit konsumtif. Prioritas penggunaan dana sebaiknya tetap diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah jangka panjang, seperti pendidikan dan modal usaha produktif, serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan agar tidak mengalami *over-leveraging* yang dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Bagi Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, pihak

manajemen disarankan untuk mempertahankan efisiensi proses pelayanan dan keamanan sistem potong gaji otomatis yang sudah berjalan baik, serta terus mempertahankan analisis kemampuan bayar (*prudential banking*) yang ketat sebelum menyetujui kredit dengan mempertimbangkan batas aman sisa pendapatan bersih nasabah PNS, agar penyaluran kredit konsumtif tidak menurunkan kesejahteraan finansial nasabah di kemudian hari. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus dengan cakupan satu kantor cabang, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian guna mengukur secara eksak persentase pergeseran nilai *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dan dampaknya terhadap tingkat tabungan jangka panjang nasabah secara makro.

REFERENSI

- Achmad, N. F. (2019). *Analisis Dampak Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah Terhadap Budaya Konsumerisme Masyarakat (Studi pada BPRS Bandar Lampung)*.
- Aris, M., & Syechalad, N. (2016). Pengaruh Pola Konsumsi Terhadap Permintaan Kredit Konsumtif di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 3(1), 100--109.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. (2026). *Data Kredit Konsumtif Provinsi Nusa Tenggara Timur*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Caksana, R., & Wulandari, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif pada Aparatur Sipil Negara Kecamatan Lumajang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(9), 889--905.
- Firmansyah, I. (2014). Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(2).
- Friedman, M. (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.
- Hafizhah, N. (2016). *Pengaruh Materialisme Terhadap Perilaku Konsumtif* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keynes, J. M. (1939). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
- Kuncoro, M. (2021). *Metode Penelitian*. BPFE.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mueller, A., Mitchell, J. E., & de Zwaan, M. (2011). Compulsive Buying Disorder: A Review. *Current Opinion in Psychiatry*, 24(1), 1--6.
- Nazir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Risiko Fintech 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Priyanti, dkk. (2020). *Pemanfaatan NVivo Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Pujaharso, C. (2013). Aplikasi Teori Konsumsi Keynes Terhadap Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Sasnita. (2010). *Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumtif pada Pegawai Negeri di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (1998). Sinar Grafika.
- Wahyu, S., Ummul Khairi, A., & Oktavia, A. (2024). Analysis of Consumptive Financing for Civil Servants at Bank Nagari Conventional and Sharia Bukittinggi. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(5), 387--402.